

ISSN: 1412-8837

**IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH UNTUK PENGEMBANGAN
EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN TAMAN
NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS): Studi Kasus Kecamatan
Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu**

**IDENTIFICATION OF REGIONAL POTENCY FOR ECONOMIC
DEVELOPMENT OF COMMUNITY AROUND NATIONAL PARK
KERINCI SEBLAT (TNKS): (Case Study in Subdistric Rimbo
Pengadang, Distric of Lebong, Bengkulu Province)**

Nola Windirah¹⁾ dan Nyayu Neti Arianti²⁾

¹⁾*Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNIB*

²⁾*Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNIB*

ABSTRACT

This research aimed to analyze 1) the potential area in Rimbo Pengadang Sub-district Lebong District and 2) which potential area can be developed become the alternatives of economic activities to the sub-district communities. The benefit expected was the community of Rimbo Pengadang Sub-district may do economic activities on those potential areas and the infringement of The Kerinci Seblat National Park may be decreased. The secondary data were used and analyzed by Flow Model qualitative method. There were four steps in Flow Model such as Data Collection, Data Reduction, Data Display and Conclusion. The research gave these results 1) the potential areas in Rimbo Pengadang Sub-district Lebong District were Community Forest and Natural Pasture, and 2) those potential areas could be developed become the business activities for the communities because of the supporting factors more than the inhibiting factors.

Keywords: *potential identification, potential area, forest community, natural pasture*

PENDAHULUAN

Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari definisi hutan yang disebutkan, terdapat unsur-unsur yang

meliputi a) Suatu kesatuan ekosiste, b) Berupa hamparan lahan, c) Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan d) Mampu memberi manfaat secara lestari. Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menenpatikan posisi penting sebagai paru-paru dunia (Zain, 1996 dalam Rahmawaty, 2002).

Namun manfaat yang telah diberikan oleh hutan sering kali dipahami secara sepihak sehingga tidak terdapat pengontrolan dalam pemanfaatan hasil hutan. Hal ini ditunjukkan dari tindakan manusia yang hanya memanfaatkan hasil hutan sepihak (kayu bangunan, sumber tambang dan mineral) tanpa memperdulikan manfaat hutan lainnya (cadangan carbon, habitat flora dan fauna), akibat yang ditimbulkan dari sikap tersebut yaitu hilangnya keseimbangan dalam ekosistem hutan. Fenomena demikianlah yang sering menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan hutan.

Banyaknya fenomena kerusakan hutan di Indonesia telah dialami pula oleh Provinsi Bengkulu, salah satunya adalah hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terdapat di Kabupaten Lebong, kerusakan hutan di Kabupaten Lebong sudah mencapai 40 persen sekitar (54.000 ha) dari kawasan hutan seluruhnya tercatat 134.845 Ha. Kerusakan kawasan hutan itu terdiri atas hutan cagar alam, hutan lindung dan TNKS. Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Lebong itu menyebar dan penyebabnya selain dicuri kayunya (*illegal logging*) juga dirambah masyarakat sekitar kawasan. Penduduk Lebong sekarang tercatat 102 ribu jiwa, sebagian besar taraf hidupnya masih miskin dengan pekerjaan petani. Lahan garapan di daerah itu sangat terbatas, karena kabupaten pemekaran dari kabupaten Rejang lebong itu seluruhnya dikelilingi oleh kawasan hutan lindung dan TNKS (Suryanto, 2006 dan Anonim, 2009).

Kecamatan Rimbo Pengadang di Kabupaten Lebong merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan TNKS dan paling panjang wilayah perbatasannya dibanding kecamatan lain di Kabupaten Lebong, sehingga kemungkinan terjadinya perambahan hutan dikhawatirkan semakin meningkat di wilayah kecamatan ini. Jumlah perambahan hutan TNKS saat ini telah menjadi masalah serius bagi kelestarian hutan, hingga perlu tindakan-tindakan tegas untuk mengatasinya.

Potensi merupakan semua sumber daya yang ada atau tersedia dan yang dapat digunakan dalam upaya mengatasi masalah perambahan hutan oleh masyarakat sekitar kawasan TNKS. Adanya informasi mengenai potensi wilayah diharapkan agar dapat membuka pikiran masyarakat di wilayah tersebut untuk memanfaatkan potensi wilayah yang ada dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Apabila hal tersebut dapat tercapai maka tanpa disadari masyarakat telah mengalihkan perhatiannya terhadap

tindakan perluasan lahan di hutan guna meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Peralihan ataupun penambahan sumber pendapatan (hutan ke non hutan), maka secara jangka panjang akan mengurangi jumlah perambahan hutan TNKS.

Berangkat dari diskusi di atas, permasalahannya adalah Apa saja potensi wilayah yang ada di sekitar wilayah TNKS yakni di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong ? dan Apakah potensi wilayah yang ada tersebut dapat dikembangkan menjadi alternatif usaha ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong ? Penelitian ini hanya membahas tentang potensi wilayah yang didasarkan (pada data tataguna lahan di Kecamatan Rimbo Pengadang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang umumnya bermatapencaharian di sektor pertanian sehingga potensi dan alternatif usaha ekonomi yang diidentifikasi dapat diterima oleh masyarakat.

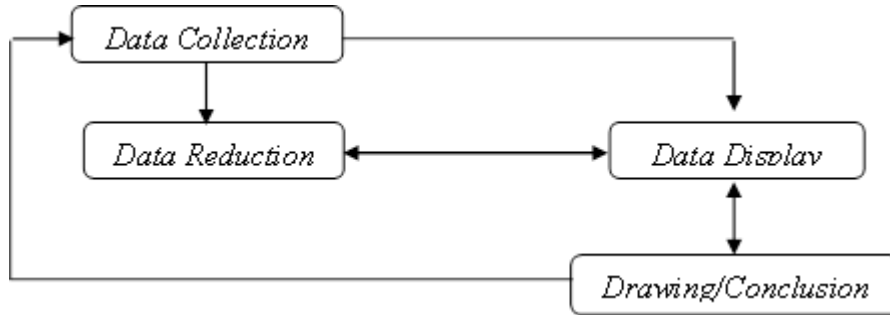
METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini berbatasan langsung dengan TNKS dengan batas terluas. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2013.

Data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh BPS Provinsi Bengkulu dan BPS Kabupaten Lebong. Selain itu juga digunakan data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak berwenang (misalnya perangkat desa), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu, dokumen mutu, laporan-laporan penelitian, artikel, majalah, karya ilmiah dari penelusuran di *internet* serta informasi lain yang berkaitan.

Analisis Potensi Wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan satu adalah metode kualitatif. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu data BPS dan data pendukung lainnya tentang tataguna lahan di Kecamatan Rimbo Pengadang. Data yang dikumpulkan tidak akan memberikan makna yang berarti apabila tidak dianalisis. Menurut Miles dan Huberman (1998) dalam tulisan Agusta (2003) bahwa untuk menganalisis data kualitatif dapat digunakan Model Aliran (*Flow Model*). Tahapan analisis data dengan Model Aliran dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.
Sketsa Model Aliran (*Flow Model*)

Kegiatan dimulai dengan *Data Collection*. Selanjutnya data-data melewati proses *Data Reduction*, dimana dalam tahap ini data yang telah dikumpulkan mengalami proses seleksi, pemfokusan, dan pengabstrakan. Tahap *Data Display* adalah proses merangkai informasi yang teroganisir lengkap dan menjadi dasar pertimbangan penarikan kesimpulan. *Conclusion* (penarikan) dilakukan dari awal pengumpulan data, penyajian data, analisis data secara kualitatif. Tiga tahap tersebut meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan baik sebelum, selama maupun sesudah pengumpulan data yang disebut dengan analisis data. Setelah data terkumpul dengan baik, kemudian diedit dan dipilah-pilah dan setelah semua dilakukan diadakan analisis secara deskriptif (Agusta, 2003).

Analisis Pengembangan Usaha Ekonomi Alternatif

Setelah memperoleh potensi-potensi wilayah yang ada di Kecamatan Rimbo Pengadang (tujuan penelitian pertama), maka untuk mengetahui apakah potensi ekonomi tersebut dapat dikembangkan sebagai alternatif usaha ekonomi, dilakukan identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Apabila jumlah faktor pendukung lebih banyak dibanding faktor penghambat maka potensi wilayah tersebut dapat dikembangkan menjadi alternatif usaha ekonomi bagi masyarakat dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong

Hasil penelitian dibahas berdasarkan tahap-tahap kegiatan analisis data dalam Model Aliran (*Flow Model*) seperti pada Gambar 1. Tahapan pertama yaitu *Data Collection* diperoleh data luas lahan menurut penggunaannya yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Pertanian dan Non Pertanian di Kecamatan Rimbo Pengadang, 2009

No.	Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1.	Lahan Sawah	650
2.	Tegal/Kebun	260
3.	Ladang/Huma	76
4.	Perkebunan	1554
5.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat (HR)	650
6.	Tambak	-
7.	Kolam Tebat/Empang	23
8.	Padang Penggembalaan/Rumput (Pastura Alam)	15
9.	Sementara Tidak Diusahakan	393
10.	Lainnya	-
Total		3620
No.	Lahan Non Pertanian	Luas (Ha)
1	Rumah Bangunan	76
2	Hutan Negara	7509
3	Rawa-rawa	-
4	Lainnya	100
Total		7685

Sumber : BPS Kabupaten Lebong, 2011.

Data-data pada Tabel 1 kemudian melewati tahap *Data Reduction*. Pada tahap *Data Reduction* diperoleh hasil bahwa pada data Lahan Pertanian, yang belum dimanfaatkan secara maksimal adalah Hutan Rakyat, Padang Penggembalaan dan Lahan Sementara Tidak Diusahakan, sedangkan pada data Lahan Bukan Pertanian yang belum dimanfaatkan adalah Lahan Lainnya (Tabel 2).

Selanjutnya dilakukan *Data Display* yang ditunjang oleh data pendukung dan hasil wawancara dengan pihak berwenang untuk mengetahui lahan apa yang potensial dikembangkan.

Hutan Rakyat (HR)

Hutan Rakyat yang ada di Kecamatan Rimbo Pengadang merupakan hasil dari program pemerintah Kabupaten Lebong untuk menciptakan HR guna mewujudkan program penghijauan dan membantu perekonomian rakyat sekitar. Tahun 2010 lalu program HR ini baru terealisasi di Lebong, dengan menanam bibit pohon Bambang Lanang (*Maduca aspera H.J. Lam*) sebanyak 30.000 batang dengan luas tanam mencapai 250 ha. Pada tahun 2012, kembali ditanam sebanyak 750.000 batang yang tersebar di 13 kecamatan. Oleh karena itu, HR di Kecamatan Rimbo Pengadang didominasi oleh pohon Bambang Lanang dengan jarak tanam 5 m x 7 m dan tanpa ada tanaman sela. Lahan HR ini belum dimanfaatkan secara maksimal mengingat sisa lahan yang masih terbilang cukup luas. Oleh karena itu, lahan HR dapat dikategorikan sebagai lahan berpotensi di Kecamatan Rimbo Pengadang.

Tabel 2. Jenis dan Luas Lahan Berpotensi Berdasarkan Tahap *Data Reduction*

No.	Kategori	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Lahan Pertanian	Hutan Rakyat (HR)	650
2	Lahan Pertanian	Padang Penggembalaan (PP) Pastura Alam	15
3	Lahan Pertanian	Lahan Sementara Tidak Diusahakan (LSTU)	393
4	Lahan Bukan Pertanian	Lainnya	100
Total			1158

Sumber : BPS Kabupaten Lebong, 2011.

Padang Penggembalaan (PP) Pastura Alam

Informasi tambahan yang diperoleh membuktikan bahwa PP merupakan lahan berpotensi. Pemanfaatan lahan PP belum maksimal ditunjukkan oleh hanya beberapa orang yang memanfaatkan rumput yang tumbuh di lahan tersebut. dengan kata lain, lahan tersebut belum dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Akibatnya, PP sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dikategorikan sebagai lahan berpotensi.

Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan (LSTU)

Lahan Pertanian Bukan Sawah yang menjadi LSTU sebenarnya telah dikelola sebelumnya oleh masyarakat setempat akan tetapi karena beberapa alasan maka lahan tersebut untuk sementara tidak diusahakan, antara lain karena rentang waktu antara masa panen usahatani dengan pembelian input untuk usahatani berikutnya, kekurangan modal atau sedang terjadi sengketa

hak kepemilikan. LSTU tersebut mayoritas lahan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup oleh pemilik lahan dan dalam jangka waktu sementara tidak diusahakan ini tergolong tidak terlalu lama, sehingga lahan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai lahan berpotensi.

Lahan Bukan Pertanian Lainnya

Luas lahan jenis ini mencapai 100 Ha. Informasi ini diperoleh dari wawancara sederhana kepada petugas BPS yang merupakan pihak pengumpul data tersebut. Hasil wawancara yang diperoleh lahan yang termasuk jenis tersebut adalah lahan yang digunakan untuk jalan di Kecamatan Rimbo Pengadang serta lahan perantara (lahan dari pinggir jalan ke pagar rumah warga). Oleh karena itu lahan lahan ini tidak termasuk sebagai lahan potensial.

Tahap terakhir dari Model Aliran adalah *Conclusion*. Pembahasan hasil tahap *Data Display* di atas telah memberikan dasar untuk menyimpulkan bahwa lahan yang potensial di Kecamatan Rimbo Pengadang adalah Hutan Rakyat dan Padang Pengembalaan.

Potensi Wilayah yang Dapat Dikembangkan sebagai Usaha Ekonomi Alternatif

Setelah mengkaji beberapa faktor yang berhubungan dengan pengembangan potensi wilayah yang ada (tujuan 1), maka diperoleh hasil bahwa lahan yang berpotensi adalah Hutan Rakyat (HR) dan Padang Pengembalaan (PP) Pastura Alam. Namun apakah HR dan PP dapat dikembangkan menjadi alternatif usaha ekonomi masyarakat perlu diidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor-faktor pendukung dan penghambat itu dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemanfaatan Hutan Rakyat dan Padang Pengembalaan sebagai Alternatif Usaha Ekonomi Masyarakat

No.	Potensi Wilayah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Hutan Rakyat (HR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan 2. KetersediaanTK 3. Keterampilan TK 4. Ketersediaan bibit tanaman obat 5. Dukungan pemerintah 	Tidak ada
2	Padang Pengembalaan (PP) Pastura Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan 2. Daya tampung lahan 	Persepsi masyarakat terhadap PP

Hutan Rakyat (HR)

Hutan Rakyat menjadi potensi wilayah dapat dijadikan alternatif usaha bagi masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang di sekitar TNKS yang ditunjukkan oleh lima faktor pendukung dan tidak ada faktor penghambat. Luas lahan HR mencapai 650 ha dan telah ada untuk mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Kepemilikan lahan yang masih dikuasai pemerintah, namun masyarakat diberi kesempatan untuk menikmati hasil dari HR asal bersedia memelihara tanaman kayu Bambang Lanang yang telah ditanam di HR. Pemanfaatan lahan biasanya dikuasai oleh delapan KK/Ha dengan alasan pemerataan. Setiap KK menguasai lahan sekitar 0,12 ha yang memiliki kurang lebih 35 batang kayu Bambang Lanang. Tanaman obat-obatan sangat dianjurkan untuk memanfaatkan lahan di sela tanaman utama karena sudah banyak dan lama diusahakan oleh masyarakat setempat, namun masih sebatas di lahan pekarangan.

Jumlah TK untuk pengelolaan HR dengan tanaman obat-obatan sebagai tanaman sela tersedia cukup baik. Jumlah anggota keluarga untuk setiap KK berkisar 4 - 8 orang, maka TK yang dapat digunakan dalam pengelolaan tanaman obat-obatan pada setiap 0,12 HR tersebut rata-rata 5 orang. Masyarakat juga sebagian besar menjadi anggota kelompok tani.

Tingkat pengetahuan dan keterampilan petani dapat dinaikkan melalui peran penyuluh pertanian. Jumlah penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Rimbo Pengadang telah mencukupi angka seharusnya atau ideal, dimana jumlah penyuluh (47 orang) lebih banyak dari jumlah kelompok tani (42 kelompok). Pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya petani dalam mengelola HR sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Tanaman obat dapat tumbuh dengan baik jika ditumpangsarikan dengan tanaman utama di HR. Petani dapat membudidayakan tanaman yang tahan naungan sampai 45%, seperti tanaman obat rimpang. Tanaman obat rimpang, seperti jahe, kunyit, temulawak, dan kencur, masih mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik pada tingkat naungan sampai 45%. Kelompok tanaman obat lain yang toleran naungan adalah *Umbeliferae* (kumis kucing) dan *Piperaceae* (cabai jawa, sirih, kemukus) (Anonim, 2010).

Tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit dan temulawak telah banyak dan lama ditanam di wilayah sekitar rumah maupun sekitar kebun yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang. Tanaman ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan lahan tidur di bawah tegakan pohon Bambang Lanang di HR. Ketersediaan bibit tanaman obat-obatan bukan merupakan permasalahan bagi masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang. Oleh karena itu, faktor ketersediaan bibit tanaman obat-obatan merupakan faktor pendukung dalam mewujudkan hutan rakyat lestari di Kecamatan Rimbo Pengadang.

HR di Kecamatan Rimbo Pengadang merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013 ini Pemkab Lebong melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lebong rencananya akan dilaksanakan program Pembangunan Hutan Rakyat seluas 250 Ha di berbagai wilayah di Kabupaten Lebong (Anonim, 2013). Pengelolaan dan pemanfaatan hasil HR diberikan penuh kepada masyarakat Program HR Lestari merupakan tindak lanjut dari Program HR demi menjamin keberlanjutan manfaat HR di masa mendatang. Berbagai dukungan pemerintah dilakukan untuk mewujudkan hal itu. Pelatihan-pelatihan pengelolaan HR maupun HR Lestari diberikan kepada pemerintah baik langsung kepada masyarakat maupun melalui penyuluh-penyuluh pertanian maupun kehutanan.

Padang Pengembalaan (PP) Pastura Alam

Padang Pengembalaan (PP) adalah padang rumput dan bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat. Dokumentasi sejarah memang menyebutkan bahwa hewan ruminansia, sebelum dijinakkan dan diternakkan oleh manusia untuk diambil hasil-hasilnya adalah hidup dengan bebas merumput di padang rumput. Disampaikan oleh Rifkin (1993) dalam *Crop Livestock System Indonesia (CLSI)* (2011) bahwa rumput-rumputan dan berbagai bentuk padang rumput mempunyai peran sebagai sumber pakan/nutrisi untuk mendukung kehidupan ternak ruminansia. Selanjutnya, sistem penggembalaan yang diterapkan pada padang penggembalaan ada empat sistem yang dapat diterapkan : 1) Penggembalaan menetap; 2) Penggembalaan bergilir (rotation grazing); 3) Penggembalaan jalur, dan 4) Penggembalaan menyingkir. Namun demikian aplikasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan (Hartati, 2013).

Luas padang rumput yang dapat dijadikan PP Pastura Alam di Kecamatan Rimbo Pengadang mencapai 15 Ha. PP Pastura Alam merupakan pilihan yang tepat untuk dikembangkan di Kecamatan Rimbo Pengadang. Pastura Alam tidak akan terlalu memberatkan masyarakat dalam pengolaannya.

Kecukupan daya tampung lahan PP Pastura Alam diketahui dengan membandingkan produktifitas hijauan PP dengan kebutuhan ternak. Ternak yang diusahakan di Kecamatan Rimbo Pengadang terdiri dari sapi potong (8 ekor), kerbau (29 ekor), kambing (451 ekor) dan domba (51 ekor). Pembahasan difokuskan pada ternak kambing dan domba, karena sapi umumnya dipelihara di kandang dan kerbau digembalakan di rawa-rawa.

Hasil penelitian Priatna (2012) bahwa hasil hijauan Pastura Alam berkisar antara 8,76 - 15,4 ton Berat Kering (BK)/Ha/th atau 54,75 - 96,25 ton Berat Basah (BS)/Ha/tahun dan dalam setiap Ha nya cukup untuk menampung 56-97 ekor kambing dewasa. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa :

$$\begin{aligned}\text{Kebutuhan pakan kambing/domba} &= \frac{54,75 - 96,25 \text{ ton BS/Ha/th}}{56-97 \text{ ekor /Ha/th}} \\ &= \pm 1 \text{ ton BS/ekor/th}\end{aligned}$$

Jika produktivitas lahan Pastura Alam adalah 150 ton BS/Ha/tahun (Reksohadiprodjo, 1991 dalam Jaliyah, 2012), maka produktifitas rumput di PP Kecamatan Rimbo Pengadang adalah 2250 ton BS/Ha/tahun. Artinya dapat menampung sekitar 2250 ekor kambing dan domba. Jika PP dimanfaatkan untuk 502 ekor kambing/domba yang ada maka baru memanfaatkan 22 persen dan 78 persen sisanya belum memanfaatkan.

Persepsi masyarakat di Kecamatan Rimbo Pengadang terhadap pengembangan PP Pastura Alam juga dapat dijadikan bagian pertimbangan dalam mewujudkannya. Sebagian besar masyarakat berpersepsi bahwa PP sulit dimanfaatkan dengan 2 alasan pokok. Pertama, alokasi waktu untuk berternak sangat sedikit karena sebagian waktu tercurah pada kegiatan pertanian yang menjadi usaha pokok. Hal ini wajar karena beternak bagi sebagian besar petani juga dianggap pekerjaan sampingan yang akan dikerjakan disela - sela waktu yang tersedia setelah pekerjaan utamanya merawat tanaman usahataninya selesai. Kedua, lahan PP yang ada bukan merupakan hak milik mereka. PP yang seluas 15 Ha merupakan milik pribadi beberapa orang anggota masyarakat sehingga masih perlu dipikirkan dahulu bagaimana sistem atau pola bagi hasil pemanfaatan PP tersebut.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil dan pembahasan di atas adalah :

1. Potensi wilayah yang ada di Kecamatan Rimbo Pengadang meliputi lahan Hutan Rakyat dan lahan Padang Penggembalaan Pastura Alam, pakdan
2. Kedua potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi masyarakat alternatif dimana faktor-faktor pendukung lebih banyak dibanding faktor penghambatnya.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka sebaiknya :

1. Program Hutan Rakyat Lestari yang merupakan tindak lanjut dari program Hutan Rakyat dan Padang Penggembalaan Pastura Alam segera diwujudkan mengingat pentingnya peran dan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf

hidup masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang, sehingga perambahan TNKS dapat ditanggulangi.

2. Faktor-faktor pendukung dioptimalkan perannya, sementara faktor penghambat seperti persepsi masyarakat dikurangi atau dihilangkan melalui penyuluhan-penyuluhan pertanian khususnya peternakan serta memberdayakan lembaga-lembaga musyawarah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2003. *Teknik pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*.
<http://ivanagusta.files.wordpress.com>. Diunduh Tanggal 9 November 2012.
- Anonim. 2009. *Informasi Umum Kehutanan Flora dan Fauna Kabupaten Lebong*. <http://lebongconservation.wordpress.com>)
 Diunduh Tanggal 9 November 2012.
- _____. 2010. *Wanafarma Melestarikan Hutan dengan Tanaman Obat*.
<http://pustaka.litbang.deptan.go.id>. Diunduh Tanggal 12 April 2013.
- _____. 2013. *Bangun Hutan Rakyat Seluas 250 Ha*.
<http://bengkuluekspress.com>. Diunduh pada tanggal 28 Januari 2013.
- BPS Kabupaten Lebong. 2011. *Kecamatan Rimbo Pengadang dalam Angka 2010*. BPS Kabupaten Lebong. Lebong.
- Crop Livestock System Indonesia (CLSI)*. 2011. *Padang Rumput dan Hijauan Pakan Ternak*. <http://croplivestocksystems.blogspot.com>.
 Diunduh Tanggal 28 Januari 2013.
- Hartati, Sri. 2013. *Pengelolaan Padang Pengembalaan*.
<http://cybex.deptan.go.id>. Diunduh Tanggal 28 Januari 2013.
- Jalayah, Ari Khiyatil. 2012. *Mengenal Kebutuhan Nutrisi Pakan Kambing PE*.
<http://forumkitabppbatu.wordpress.com>. Diunduh Tanggal 14 Februari 2013.
- Priatna, Apep Rudi. 2012. *Model Penyediaan Pakan Hijauan bagi Ternak Kambing di Ekosistem Kebun Jeruk*.
<http://apeptea.wordpress.com>. Diunduh tanggal 14 Februari 2013.
- Rahmawaty. 2002. *Rencana Pemanfaatan Lahan Tidur Berdasarkan Pendekatan Ekosistem*. <http://repository.usu.ac.id>. Diunduh pada Tanggal 14 April 2013.
- Suryanto. 2006. *Hutan TNKS Kabupaten Lebong Terbakar*.
<http://antaranews.com>. Diunduh Tanggal 14 April 2013.